

### PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAFRAH

Jalan Beringin II No.35 Telp. (0724) 481301 Teluk Betung 35229 http://www.bkdlampungprov.go.id email: bkd.lampungprov@gmail.com

NOMOR SOP	VI.04.01.01.11					
TGL. PEMBUATAN	10 Oktober 2025					
TGL. REVISI	-					
TGL. PENGESAHAN	10 Oktober 2025					
DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG					
NAMA SOP	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK					

## SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008:
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota:
- 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas:
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat.

- 1. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA, maksimal S1
- Memiliki pengetahuan mengenai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbikaan Informasi Publik dan turunannya
- 3. Jabatan fungsional umum/Jabatan fungsional tertentu Pranata Komputer
- 4. Mempunyai keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mampu berkomunikasi dengan baik.

#### KETERKAITAN

- 1. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
- 2. SOP Penetapan dan Pemutakhitan Daftar Informasi Publik
- 3. SOP Pengujian tentang Konsekuensi Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi dikecualikan
- 4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

- PERALATAN / PERLENGKAPAN

  1. Komputer/PC/Laptop
- 2. Printer/Scanner
- 3. Jaringan Internet

### PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan pelayanan informasi tersebut tidak akan mencapai sasaran.

#### PENCATATAN DAN PENDATAAN

Daftar Informasi dikecualikan dalam bentuk tercetak (Hardcopy)

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Keterangan
		Peminta Informasi	Petugas Pelayanan	PPID	Bidang Terkait	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Peminta Informasi dapat menyampaikan permintaan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak I;angsung (online/offline)					Formulir permintaan informasi;     Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon informasi.	Pada waktu pelayanan, hari kerja	Formulir permintaan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy atau scan identitas diri	
			<u> </u>			Semua data-data	Pada hari dan	Daftar Informasi Publik	
2.	Melakukan registrasi berkas pemohon infromasi publik (online dan offline)					peminta informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	jam kerja untuk peminta informasi secara langsung dan setiap saat untuk peminta informasi secara tidak langsung	yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta kepada bidang terkait untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam Daftar Informasi Publik, untuk diberikan kepada peminta informasi					Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan	10 (sepuluh) hari kerja, sejak permintaan informasi diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Daftar Informasi Publik	
4.	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh peminta informasi				•	Informasi/dokumen yag diminta oleh peminta informasi	Perpanjangan permintaan imformasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yag diminta oleh peminta informasi	
		10 Hari Kerja							

# **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**



RENDI RESWANDI, S.STP., M.Si PEMBINA TINGKAT I / IV.b NIP 19770526 199712 1 001